

Mas'ud: Dewan Bisa Inisiatif

MALANG— Belum keluarnya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur UU. No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD, tidak menjadi alasan bagi anggota DPRD Kota Malang untuk vakum dari kegiatan kedewanan. Mestinya anggota dewan memiliki inisiatif untuk mengisi masa menunggu PP tersebut.

Guru Besar bidang Ilmu Pemerintahan FISIP UMM, Prof H.M. Mas'ud Said mencontohkan, DPRD Jatim yang sudah dapat membahas tata tertib (Tatib) sebagai langkah awal untuk pembentukan alat kelengkapan dewan. Skema itu dapat dilakukan anggota dewan yang ada di daerah untuk melakukannya.



H.M. Mas'ud Said

"Tidak harus menunggu PP, anggota dewan bisa berinisiatif menyusun Tatib dengan bersandar pada UU yang berlaku dan aturan yang ada. PP yang lama masih bisa dijadikan acuan, tapi tidak 100 persen. Hal-hal yang tidak menabrak UU baru dapat dijadikan *blue print* untuk Tatib anggota dewan," kata Mas'ud kepada Malang Post kemarin.

Banyak hal yang sudah tegas disebutkan dalam UU. No. 27 tahun 2009, kecuali hal-hal teknis termasuk terkait dengan

keuangan yang harus menunggu aturan pelaksana berupa PP. Untuk mendapatkan kejelasan terkait pasal-pasal, bisa dilakukan konsultasi kepada Depdagri.

Dalam ilmu pemerintahan ada istilah *just doing by the rule*, birokrasi atau pemerintah hanya dapat melaksanakan sesuatu kalau sudah siap dan jelas aturan hukumnya. Kalau rule atau aturannya belum lengkap, tidak dapat berbuat sesuatu. Hal itu pula yang dialami anggota DPRD yang ada di daerah. "Sudah menjadi adat pemerintah pusat, UU dikeluarkan lebih dulu, aturan pelaksanaannya berupa PP baru keluar setelah 2 bulan, 3 bulan atau lebih dari itu. Jangan-jangan PP itu akan dikeluarkan pemerintah setelah anggota DPR RI dilantik, padahal anggota dewan di daerah sudah teriak-teriak," untkapnya.

Kalau itu yang terjadi, anggota dewan di daerah yang sudah dilantik sejak Agustus lalu, harus menunggu sampai pelantikan DPR RI yang akan dilakukan Oktober mendatang. Padahal, PP itu sudah sangat urgen bagi anggota dewan yang bada di daerah. Harusnya, aturan pelaksana itu dapat diselesaikan lebih cepat.

Ketua Lazis Sabilillah itu menilai, keterlambatan munculnya PP bukan karena kurangnya good will dari pemerintah pusat. Tapi karena kendala teknis prosedural, salah satunya libur panjang saat lebaran.

"Kendati belum ada PP, anggota dewan masih bisa melakukan pengawasan, dan juga belajar lebih banyak lagi tentang legislasi dan budgeting. Dari banyak seminar anggota dewan, banyak keluhan dari anggota dewan yang minim pengetahuan strategi pembiayaan APBD," terangnya. Saat inilah menurutnya, waktu yang tepat bagi anggota dewan untuk mempelajari lebih banyak terkait dengan kertas kerja anggaran belanja, strategi pembiayaan dan hal-hal lainnya yang terkait dengan budgeting. (aim/lim)